



LAPORAN LOKAKARYA

Lokakarya Nasional Konsultasi Masyarakat Madani Mengenai Perspektif Perempuan Dalam Kebijakan Mengenai Perempuan, Perdamaian, Dan Keamanan

8-9 Juni 2011

*Hotel Aston Kota Manado, Manado,
Sulawesi Utara, Indonesia*

Diselenggarakan dalam rangka Jejaring N-PEACE dengan didukung oleh

UNDP Regional Crisis Prevention and Recovery Team, Asia Pacific Regional Centre, Bangkok dan AusAID bekerja sama dengan, UNDP Indonesia dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak, dan Search for Common Ground

The Institute for
Inclusive Security



Glosarium

ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
GDP	Gender dan Pembangunan
ITP	Institut Titian Perdamaian
KKR	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KSBG	Kekerasan Seksual dan Berbasis Gender
LINA	Liga Inong Aceh
KEMENKO KESRA	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KEMENEG P3A	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Musrenbang	Musyawarah Rencana Pembangunan
N-PEACE	ENgage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment
OMM	Organisasi Masyarakat Madani
OPPAP	Office of the Presidential Advisor on the Peace Process
PILKADA	Pemilihan Kepala Daerah
PPK	Perempuan, Perdamaian dan Keamanan
Qanun	Peraturan perundang-undangan (berlaku di Aceh)
RAN	Rencana Aksi Nasional
RDKPBB	Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
SCFG	Search for Common Ground

Daftar Isi

GLOSARIUM	3
KATA PENGANTAR	5
TENTANG LAPORAN INI	6
RANGKUMAN EKSEKUTIF	7
Lokakarya Nasional OMM	7
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (RDKPBB) No. 1325	7
Rencana Aksi Nasional (RAN) PPK	8
Jejaring N-Peace	9
1. Sambutan Bapak Stephen RODRIQUES, Deputy Country Director UNDP Indonesia	10
2. Sambutan Bapak Willem Rampangilei, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	12
3. Memperkenalkan Jejaring N-Peace: Apa itu prakarsa N-PEACE? Latar Belakang dan Kegiatan Terencana. Dipresentasikan oleh Radhika Behuria, tim Regional Crisis Prevention and Recovery, UNDP Asia Pacific Regional Centre, Bangkok	13
4. Memetakan persoalan konflik dan prioritas perempuan dalam latar pascakonflik di Indonesia	15
5. Pengalaman Filipina dalam Mengembangkan dan Melaksanakan Rencana Aksi Nasional 1325 - Beberapa Catatan Pengalaman - Presentasi oleh Karen Tanada, Director, Gaston Z. Ortigas Peace Institute, Filipina.	18
6. Presentasi RAN mengenai Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan dan agenda pelaksanaan MENEG P3A. Presentasi oleh Bapak Jonhar Johan, Asisten Deputi Perlindungan Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24
7. Umpan balik mengenai RAN PPK dari perspektif perempuan dalam latar pascakonflik	26
8. Menciptakan advokasi mengenai persoalan perempuan, perdamaian, dan keamanan Membangun Strategi Edukasi, Sosialisasi, dan Kampanye untuk Jejaring N-Peace: Presentasi oleh Brian Hanley dan Agus Hadi Nahrowi, Search for Common Ground	29
9. Mengembangkan strategi advokasi dan sosialisasi untuk Jejaring N-Peace di Indonesia:	30
10. Langkah Selanjutnya	33
LAMPIRAN	34
Daftar peserta	34
Kerangka Acuan Kerja Lokakarya	36
Agenda Lokakarya	36

KATA PENGANTAR

foreword

Dengan ini saya persembahkan Laporan Konsultasi CSO Nasional tentang Perspektif Perempuan dalam Kebijakan tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan yang diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 8-9 Juni 2011. Laporan tersebut memberikan poin-poin utama konsultasi tersebut dan mendokumentasikan kebijakan dan kontribusi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional. Laporan ini berfungsi sebagai alat untuk mengadvokasikan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, dan bagi kementerian, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menindaklanjuti proses penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.

Konsultasi CSO nasional diselenggarakan dalam rangka mendukung proses penyusunan RAN yang dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Para peserta lokakarya, yang sebagian besar terdiri dari pemimpin CSO perempuan dari 11 provinsi, yaitu Aceh, Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, mendapat kesempatan untuk bertukar pengalaman serta berkontribusi terhadap penyusunan RAN. Konsultasi nasional tersebut memberikan ruang untuk membahas prioritas perempuan pasca konflik dan untuk memastikan bahwa prioritas dan kebutuhan tersebut diintegrasikan ke dalam RAN.

Konsultasi ini juga menandai partisipasi Indonesia dalam jaringan multinasional yang disebut N-PEACE yang dibentuk pada peringatan sepuluh tahun Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325

tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di tahun 2010. Pada kesempatan ini, UNDP juga meluncurkan strategi regional untuk bekerja sama dengan serta mendukung organisasi masyarakat sipil untuk isu perempuan, perdamaian dan keamanan yang melibatkan Indonesia, Nepal, Sri Lanka dan Timor-Leste. N-PEACE adalah singkatan dari "ENGage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment" (Keterlibatan untuk Perdamaian, Kesetaraan, Akses, Masyarakat dan Pemberdayaan). Jaringan ini bertujuan untuk mendukung kepemimpinan perempuan yang lebih dikenal dalam pencegahan konflik, penyelesaian sengketa, rekonstruksi dan pembangunan perdamaian di tingkat masyarakat, nasional dan regional.

Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan terima kasih kepada Search for Common Ground, Institute Titian Perdamaian, Liga Inong Aceh atas dukungan yang diberikan terhadap lokakarya ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari UNDP Indonesia dan tim Pencegahan dan Pemulihan Krisis Regional dari Pusat Regional UNOP Asia Pasifik atas panduan teknis yang diberikan sebelum dan selama penyelenggaraan lokakarya tersebut.



Stephen RODRIQUES

Deputy Country Director
UNDP Indonesia

TENTANG LAPORAN INI

about this report

Laporan ini dimaksudkan untuk menyorot pokok-pokok Lokakarya Nasional Organisasi Masyarakat Madani (OMM) mengenai Perspektif Perempuan dalam Membuat Perdamaian di Indonesia. Lokakarya ini menjadi forum konsultatif antar-OMM perempuan ihwal peranan perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Laporan ini bertujuan memerinci berbagai sesi, presentasi, dan pokok-pokok diskusi. Laporan ini juga mendokumentasikan kebijakan dan kontribusi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional. Laporan ini bisa menjadi alat dalam mengadvokasi peranan perempuan dalam perdamaian dan keamanan sebagaimana diamanatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (RDKPBB) No. 1325, dan sebagai alat untuk kementerian pemerintah terutama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MENEG P3A) dalam menyempurnakan bentuk proses pengembangan Rencana Aksi Nasional Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (PPK). Ia memberi keterangan yang relevan mengenai proses yang telah diselenggarakan

untuk mengembangkan RAN di Indonesia dan isinya. Selain itu, laporan ini memetakan prioritas dari OMM dan aktivis hak perempuan dari lebih dari sepuluh provinsi. Isi yang disajikan di dalam laporan ini berlandaskan perspektif perempuan di wilayah pascakonflik dan wilayah yang berpotensi mengalami konflik di Indonesia.

Konsultasi Nasional OMM diselenggarakan dalam rangka kegiatan jejaring N-Peace oleh UNDP bekerja sama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Terima kasih khusus diucapkan kepada mitra jejaring, yaitu Search for Common Ground (SCFG), Institut Titian Perdamaian (ITP), dan Liga Inong Aceh (LINA) Aceh atas fasilitasi mereka selama lokakarya konsultasi. Pihak penyelenggara sangat mengapresiasi antusiasme dan partisipasi aktif peserta lokakarya.

Jejaring N-PEACE difasilitasi oleh UNDP Asia Pacific Regional Centre dan UNDP Country Office di Indonesia, Nepal, Sri Lanka, dan Timor-Leste, dengan dukungan dari AusAID.



RANGKUMAN EKSEKUTIF

executive summary

Lokakarya Nasional OMM

Lokakarya Nasional OMM diselenggarakan oleh UNDP Asia Pacific Regional Centre dan Country Office di Indonesia, dengan pendampingan fasilitasi dari anggota Jejaring N-Peace ITP dan LINA-Aceh dan Search for Common Ground. Pertemuan ini memberi platform tempat OMM dan aktivis perempuan dari 10 provinsi pascakonflik dan berisiko tinggi bisa berdiskusi mengenai tantangan dan modalitas pelaksanaan rancangan kebijakan mengenai Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (PPK), dan menyoroti peranan perempuan dalam membangun dan memulihkan perdamaian di dalam masyarakat. Perspektif dan prioritas tersebut dicatat di dalam laporan ini dan akan dibagi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, untuk digunakan sebagai masukan dalam menyelesaikan rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) PPK. Di sisi lain, kegiatan ini juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, dan menciptakan kepemilikan yang lebih besar atas proses pengembangan RAN.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (RDK PBB) No. 1325

Perempuan dan anak membentuk bagian terbesar dari mereka yang dirugikan oleh konflik bersenjata. Situasi konflik cenderung memperparah pola-pola diskriminasi yang sudah ada dan menempatkan perempuan dan anak perempuan dalam risiko kekerasan seksual, fisik, dan psikologis yang lebih tinggi. Perempuan juga menderita konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial ekonomi lama setelah konflik berakhir. Beberapa tahun belakangan ini muncul kesadaran yang semakin tinggi untuk memahami dampak konflik bersenjata atas perempuan dan anak perempuan dan untuk menggalakkan pranata kelembagaan yang

efektif untuk memastikan kepada perempuan perlindungan dan partisipasi penuh dalam semua proses yang berhubungan dengan rekonstruksi pascakonflik, pembangunan perdamaian, dan negosiasi perdamaian.

Pada 31 Oktober 2000, PBB mengadopsi RDK PBB 1325, yang menyerukan partisipasi dan pelibatan perempuan di dalam pencegahan dan penyelesaian konflik dan di dalam pembangunan perdamaian, dan juga partisipasi perempuan yang lebih besar di tingkat pengambilan keputusan dalam proses penyelesaian konflik dan perdamaian. Ia juga menyerukan pengadopsian perspektif gender, termasuk diprioritaskannya kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan kala repatriasi dan pemukiman kembali dan dalam rehabilitasi, reintegrasi, dan rekonstruksi pascakonflik; penyatu-paduan perspektif gender dalam operasi penjagaan perdamaian; dan pengarusutamaan gender dalam pelaporan dan pelaksanaan sistem PBB terkait dengan konflik, perdamaian, dan keamanan.

RDK PBB 1325 mencerminkan perlunya menyatu-padukan persoalan kekerasan seksual ke dalam mandat-mandat intervensi pemerintah. RDK PBB 1325 serta resolusi turunan 1820, 1888, dan 1889 menandakan pergeseran yang nyata dalam hal memandang pengalaman konflik perempuan sebagai bagian integral dari pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Meski RDK PBB 1325 merupakan langkah signifikan dalam perjuangan hak perempuan, lebih dari satu dekade setelah pengadopsiannya, tetap dibutuhkan lebih banyak upaya lagi untuk menerjemahkan retorika ke aksi. Di tingkat nasional, menggalang kemauan politik untuk mendapatkan pengakuan, mengalokasikan sumber daya, dan mengambil tindakan terkait pelaksanaan resolusi 1325 masih menjadi tantangan yang tidak kecil.

Rencana Aksi Nasional (RAN) PPK

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang melaksanakan proses pengembangan RAN yang akan memungkinkan RDK PBB 1325 untuk diterjemahkan ke aksi, sembari memperhatikan konteks nasional. Pada khususnya, RAN dirumuskan untuk menjadi garis panduan bagi pemangku kepentingan di tingkat nasional dan lokal (pemerintah; OMM yang bergiat di bidang perempuan dan anak-anak, sektor swasta, organisasi masyarakat sosial dan politik, media massa, lembaga adat, lembaga agama, lembaga hak asasi manusia independen seperti komisi hak asasi manusia, komisi nasional perempuan, dan komunitas donor internasional) dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan perdamaian dan keamanan melalui penyatu-paduan analisis gender ke dalam semua kebijakan pemerintah, dan program-program sebelum, pada saat, dan setelah konflik.

Latar belakang yang menentukan perumusan RAN PPK di Indonesia mencakup unsur dan persoalan sebagai berikut:

1. Sampai sekarang, kekerasan berbasis gender di Aceh, Papua, Ambon, Atambua, dan Kalimantan Barat belum sepenuhnya diselesaikan melalui proses hukum.
2. Keamanan dan perlindungan HAM merupakan prakondisi untuk perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan. Mereka merupakan fondasi dan pilar untuk pembangunan dan kemakmuran.
3. Pemerintah mengakui pentingnya kerangka kerja konseptual yang secara komprehensif dan strategis bisa memandu perlindungan HAM dan transformasi konflik di Indonesia. RDKPBB 1325 merupakan acuan yang baik untuk merangkakan rencana aksi perlindungan perempuan dalam situasi konflik bersenjata dan sosial.

Tujuan RAN adalah untuk:

1. Memastikan perlindungan hak perempuan dalam situasi konflik sosial dan bersenjata;
2. Memberdayakan dan memastikan partisipasi perempuan dalam penyelesaian perdamaian, termasuk ihwal pencegahan, dan negosiasi perdamaian;
3. Menggalakkan dan mengarusutamakan gender ke dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
4. Melembagakan suatu sistem untuk memantau, menilai, dan melaporkan pelaksanaan RAN;
5. Memastikan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian di tingkat nasional dan internasional;
6. Memastikan keterlibatan perempuan dalam perencanaan program terkait pelucutan senjata;
7. Menjamin keadilan legal untuk kasus-kasus terkait kekerasan berbasis gender dalam situasi konflik sosial dan bersenjata

Bidang-bidang yang menjadi prioritas RAN adalah memastikan perwakilan perempuan dalam proses perdamaian di tingkat nasional dan internasional, memastikan pelibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program terkait dengan perdamaian dan keamanan, dan menjamin keadilan legal untuk kasus-kasus kekerasan gender dalam konflik sosial dan bersenjata.

Sebagai bagian dari RAN PPK, lembaga pelaksana di tingkat nasional dan lokal diharapkan melaksanakan pengarusutamaan gender di empat bidang:

- a. Pencegahan, yang mencakup resolusi dan rehabilitasi
- b. Pembangunan perdamaian, termasuk reformasi keamanan, perwakilan perempuan dalam pembuatan kebijakan dan lembaga keamanan perdamaian

N-PEACE Network

Engage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment

- c. Pengalokasian sumber daya kepada organisasi perempuan
- d. Penyatuan-paduan perspektif gender ke dalam keamanan dan keadilan

Rancangan RAN mencakup matriks rencana aksi untuk 2010-2014, yang menggariskan empat sasaran:

1. Pencegahan dan Perlindungan: menjamin perlindungan hak perempuan dalam situasi konflik sosial dan konflik.
2. Pemberdayaan dan Partisipasi: memberdayakan dan menjamin partisipasi perempuan dalam kegiatan pencegahan, resolusi, dan rehabilitasi.
3. Penggalakkan dan pengarusutamaan perspektif gender ke dalam pencegahan konflik, resolusi, dan rehabilitasi.
4. Pengaturan sistem pemantauan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan RAN.

Jejaring N-PEACE

N-PEACE (ENgage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment) merupakan jejaring multi-negara yang didirikan untuk mendukung kepemimpinan dan kapasitas perempuan dalam pencegahan konflik, penyelesaian perselisihan, rekonstruksi, dan pembangunan perdamaian di tingkat regional, nasional, dan masyarakat. Jejaring tersebut diluncurkan pada Oktober 2010 dalam rangka memperingati sepuluh tahun pengadopsian RDK PBB 1325, sebagai bagian dari siasat untuk menjawab dan mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh perempuan ihwal perdamaian dan keamanan. Jejaring ini beroperasi di empat negara yang menghadapi darurat kronis akibat risiko tinggi terhadap konflik dan suseptibilitas terhadap bencana alam; yaitu, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, dan Timor-Leste. Beberapa di antara tantangan tersebut adalah kapasitas yang rendah, termasuk keterbatasan akses ke informasi dan lembaga untuk mengadvokasi dan mengangkat prioritas perempuan ke tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi, dan gap antara kebutuhan perempuan di lapangan

dan pertimbangan pembuat kebijakan. Jejaring N-Peace didirikan untuk menjawab dan mengatasi tantangan tersebut dengan memfasilitasi interaksi antara pemerintah, OMM, aktivis perempuan, dan lembaga pembangunan internasional. Ia memungkinkan anggotanya untuk saling memetik manfaat dari pengalaman masing-masing, dan mendokumentasikan pengalaman untuk menyoroti tantangan, solusi, dan strategi.

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh anggota dari keempat negara tersebut, kegiatan Jejaring N-Peace ditetapkan menurut tiga komponen:

1. **Pengembangan Kapasitas:** Bermitra dengan Institute for Inclusive Security, suatu pul perempuan akan dilatih menjadi pelatih sebagai bagian dari Jejaring N-Peace. Program pelatihan pelatih akan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas perempuan untuk mengadvokasi perdamaian dan keamanan. Melalui pendampingan teknis dan keuangan, pelatih akan melokalkan pengetahuan tersebut dengan menggalakkan kapasitas kepemimpinan yang lebih besar antara organisasi akar rumput dan perempuan, dalam hal keterampilan advokasi, negosiasi, dan mediasi untuk manajemen konflik, pembangunan perdamaian, dan pemulihan.
2. **Sosialisasi dan advokasi:** Bermitra dengan Search for Common Ground, N-Peace regional menganugerahkan dan prakarsa mengakui serta potongan-potongan advokasi negara tertentu akan dikembangkan untuk menyoroti peran kepemimpinan perempuan dalam pembangunan perdamaian dan prioritas kunci ihwal perempuan, perdamaian, dan keamanan.
3. **Menghubungkan pekerjaan hilir dan hulu dengan cara menggalakkan kemitraan strategis:** Jejaring N-Peace telah mampu membangkitkan momentum di tingkat negara, dengan menggunakan anggotanya untuk menginisiasi konsultasi dan prakarsa merespons konteks negara yang unik.

1

Sambutan Bapak *Stephen RODRIQUES*, Deputy Country Director UNDP Indonesia

Rangkuman sambutan:

- Mendukung dan berinvestasi dalam perempuan merupakan prinsip inti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian sepanjang dasawarsa-dasawarsa belakangan ini memberi bukti bahwa masyarakat, kawasan, dan negara yang berinvestasi dalam perempuan mengalami kemajuan yang lebih pesat dan mengalami kenaikan indikator pembangunan manusia yang lebih baik.
- Jejaring N-Peace memfokus pada empat negara krisis berisiko tinggi yang mengalami darurat kronis karena berada dalam keadaan pascakonflik dan berisiko mengalami bencana alam, yaitu Indonesia, Nepal, Sri Lanka, dan Timor-Leste. Meski berbeda dalam hal konteks, negara-negara ini mempunyai kesamaan dalam hal tantangan yang dihadapi perempuan dalam keadaan konflik dan pascakonflik. Tantangan berkisar mulai dari perempuan yang kurang terwakili di dalam proses resolusi konflik dan pembangunan perdamaian formal; sampai sumber daya yang kurang dan akses yang terbatas ke layanan perlindungan sosial tertentu. Tantangan-tantangan tersebut semakin diperparah oleh kenyataan bahwa perempuan sering kali adalah yang secara timpang menderita selama dan setelah konflik, dan bahwa mereka adalah yang paling rentan terhadap kekerasan berbasis gender, sehingga mengancam keselamatan dan keamanan pribadi mereka. Oleh karena itu, Jejaring N-Peace berupaya memberi berbagai organisasi dan pemimpin perempuan pendampingan melalui pelatihan dan dengan cara memberi mereka ruang untuk berjejaring dan menyuarakan tuntutan, kebutuhan dan kontribusi mereka, baik di negara mereka sendiri maupun lintas keempat



negara yang berpartisipasi. Melalui proses ini UNDP bertujuan berinvestasi dalam dan memberdayakan perempuan.

- Unsur kunci lain dari konsultasi ini adalah memetakan bidang-bidang prioritas kunci untuk terus menciptakan advokasi dan kesadaran tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan perempuan, perdamaian, dan keamanan. Salah satu mitra Jejaring N-Peace, Search for Common Ground, akan membantu membernaskan pekerjaan advokasi ini.
- Sejumlah negara telah mempunyai komitmen terhadap pelaksanaan RDK PBB 1325, melalui pengembangan RAN atau strategi lainnya di tingkat nasional. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak, mengujungtombaki penggalakkan RDK PBB 1325 dan mengembangkan RAN PPK. Proses perumusan

N-PEACE Network

Engage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment

RAN adalah sangat penting karena ia akan diterbitkan sebagai Keputusan Presiden begitu disetujui. Oleh karena itu adalah sangat penting bahwa pengembangan RAN serta penetapan prioritas berlangsung secara inklusif. Dengan menyertakan lebih banyak suara, terutama suara perempuan dari latar pascakonflik, RAN Indonesia bisa menjadi alat yang lebih efektif dalam mengadvokasi peranan perempuan dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan, dan bisa dibagi sebagai contoh yang baik dengan negara lainnya di kawasan ini sebagai pembelajaran.

- Konsultasi ini memberi kesempatan yang baik untuk bersama-sama memusyawarahkan prioritas-prioritas perempuan dalam situasi pascakonflik dan memastikan bahwa RAN, yang tengah dirancang itu, mampu menginkorporasikan prioritas dan kebutuhan tersebut.
- Konsultasi ini dan Jejaring N-Peace merupakan buah dari kemitraan antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan; Insitutit Titian Perdamaian, Liga Inong Aceh, dan UNDP. Pendampingan AusAID memainkan peranan yang sangat penting dalam mempertahankan kelangsungan kegiatan-kegiatan jejaring, dan kemitraan dengan Institute for Inclusive Security dan Search for Common Ground.

N-PEACE

2

Sambutan Bapak *Willem RAMPANGILEI*, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Rangkuman sambutan:

- Telah ada sejumlah komitmen global terhadap pemberdayaan perempuan, termasuk Konferensi Perempuan Sedunia yang pertama pada 1975 di Meksiko; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang diadopsi pada 1979; Konferensi Perempuan Sedunia pada 1980 di Kopenhagen untuk menguatkan tindakan-tindakan nasional untuk memastikan kepemilikan dan pengendalian perempuan atas harta, dan masih ada beberapa setelah itu.
- Perempuan adalah aset pembangunan nasional; Indonesia juga harus mengakui perempuan sebagai aset pembangunan yang besar. Gagal memberdayakan mereka akan menjadi kesempatan yang hilang. Perempuan memainkan peranan yang berbeda-beda dan berkontribusi ke pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup, dan sektor energi dan ke pembangunan yang berkelanjutan, tapi peranan dan lembaga mereka belum digunakan secara optimal.
- Indonesia berhadapan dengan banyak konflik, dan sering kali perempuan dan anak menjadi yang paling menderita. Respons pemerintah terhadap hal ini sedikit banyak masih terbatas. Sementara di sisi lain, peranan potensi perempuan dalam resolusi konflik dan negosiasi belum digunakan secara optimal. Ada sejumlah sebab mengapa peranan mereka masih terbatas dalam aspek dan sektor ini. Pertama, faktor budaya sering menempatkan perempuan dalam posisi yang terpinggirkan. Di sini perlu dilakukan upaya-upaya untuk



mensosialisasikan konsep kesetaraan gender dan pemberdayaan, perlu ada akses yang lebih bagi perempuan ke pendidikan, ekonomi, dan politik. Pada saat yang sama, upaya-upaya tersebut harus dilengkapi dengan prakarsa pengembangan kapasitas untuk perempuan. Kedua, harus ada kemauan politik untuk secara nyata mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui langkah aksi yang konkret dan sumber daya.

3

Memperkenalkan Jejaring N-Peace: Apa itu prakarsa N-PEACE? Latar Belakang dan Kegiatan Terencana. Dipresentasikan oleh *Radhika BEHURIA*, tim Regional Crisis Prevention and Recovery, UNDP Asia Pacific Regional Centre, Bangkok

Sesi ini mengurai tentang Jejaring N-Peace – apa yang dilakukan, bagaimana didirikan, rencana dan prioritas tahun depan, dan bagaimana peserta bisa menjadi bagian dari jejaring dan membantu memburnaskan kegiatan-kegiatan di masa mendatang.

Latar Belakang:

Pada 2010, UNDP bersama OMM dan organisasi mitra mengembangkan strategi perikatan PPK. Strategi tersebut menguraikan cara-cara UNDP bisa bekerja sama dengan dan mendampingi OMM dan perempuan yang bergiat di tingkat akar rumput menuju suatu tujuan bersama. Strategi berfokus pada negara-negara yang tengah melangsungkan proses-proses lingkungan pembangunan perdamaian dan pemulihan, yaitu Indonesia, Timor-Leste, Sri Lanka, dan Nepal. Strategi tersebut berlandaskan pada komitmen terhadap resolusi PBB terkait, termasuk RDK PBB 1325, 1820, 1888 dan 1889, di samping sejumlah komitmen lainnya di tingkat global yang menyerukan langkah-langkah pendampingan prakarsa perdamaian lokal dan pelibatan perempuan dalam pembuatan perdamaian, dan pembangunan perdamaian dan pemulihan. Guna memusyawarahkan strategi tersebut dan aspek-aspek pelaksanaannya, suatu konsultasi lintas diselenggarakan pada Oktober 2010 di Bangkok, Thailand, yang melibatkan perwakilan OMM, pemerintah, dan PBB dari keempat negara peserta. Jejaring N-Peace dibentuk pada saat konsultasi tersebut.



Sejumlah persoalan kunci yang berujung dengan strategi perikatan dan Jejaring N-Peace

1. Perempuan sering kali adalah yang paling rentan dalam situasi krisis.
2. Meski perempuan lazimnya dipandang sebagai korban, mereka juga mengemban berbagai peranan sebagai kombatan, aktivis, pembangun perdamaian dan mediator, yang belum diakui.
3. Mekanisme yang mendampingi perempuan dalam menyuarakan prioritas mereka dan membantu mereka mempengaruhi kebijakan yang berdampak terhadap mereka masih terbatas.

4. Forum dan platform bagi mereka untuk bertukar gagasan dan menyuarakan kebutuhan dan kontribusi mereka masih kurang.

Mengapa perlu ada strategi perikatan?

- Untuk bekerja sama dalam menangani persoalan bersama dan menuju sasaran-sasaran bersama, yaitu memberdayakan perempuan dan menjadikan prioritas mereka inti dari proses-proses pembangunan perdamaian dan pemulihan.
- Untuk mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan – organisasi dan orang seorang – guna mencapai efisiensi yang lebih tinggi.
- Untuk menciptakan advokasi dan kesadaran yang lebih kuat, agar bisa menetapkan prioritas dan bersama-sama mengadvokasi mereka.

Prinsip strategi perikatan

- Perikatan antarpemangku kepentingan di dalam dan lintas keempat negara – Indonesia, Nepal, Sri Lanka, dan Timor-Leste.
- Perikatan dengan berbagai pemangku kepentingan: OMM, pemerintah, lembaga negara, UNDP/ PBB, lembaga pelatihan regional, dan jejaring.
- Perikatan untuk bersama-sama menggalakkan perdamaian, kesetaraan, meningkatkan akses dan pemberdayaan, juga perwakilan Jejaring N-Peace (ENGage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment).

Kegiatan terencana dan prioritas N-Peace

Ketika Jejaring N-Peace diluncurkan pada Oktober 2010, para anggota menetapkan sejumlah persoalan dan prioritas inti ihwal PPK yang mereka anggap sangat mendesak untuk dijawab dan diatasi, melalui jejaring. Berdasarkan analisis terhadap gap-gap yang teridentifikasi itu, maka dirangkakan respons sebagai berikut yang sekaligus menjadi pilar/ komponen utama jejaring.

- Pengembangan kapasitas: Program pelatihan pelatih (ToT) regional telah dikembangkan yang bertujuan melengkapi perempuan

dengan kapasitas dan pengetahuan untuk menyelenggarakan agenda PPK. ToT akan membantu membangun suatu pul pelatih yang berpengetahuan soal RDK PBB 1325, kesepakatan perdamaian dan negosiasi, konsep terkait keadilan peralihan dan rekonstruksi pascakonflik, serta keterampilan yang terkait dengan advokasi, berjejaring, dan perencanaan strategis. Lewat ini, jejaring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemimpin perempuan sehingga mereka bisa melatih dan mendampingi yang lainnya dalam mengadvokasi inklusi perempuan ke dalam semua aspek proses perdamaian dan keamanan.

- Sosialisasi dan Advokasi: Guna menciptakan advokasi yang lebih besar terkait persoalan PPK dan untuk mengakui dan mengadvokasi peran kepemimpinan perempuan sebagai pembangun perdamaian, jejaring akan mengembangkan potongan-potongan advokasi untuk menggalakkan kesadaran tentang peranan perempuan dalam pembangunan perdamaian dan pemulihan. Pada saat yang sama, melalui suatu prakarsa pengakuan dan penghargaan bernama penghargaan N-Peace, jejaring akan menetapkan dan mengakui pekerjaan pemimpin perempuan di tingkat akar rumput.
- Menggalakkan kemitraan strategis untuk PPK: Menyadari keunikan konteks negara, konsultasi di tingkat negara tengah diorganisasi untuk menetapkan prioritas dan mengoordinasi upaya-upaya aktivis perempuan dan OMM untuk mempengaruhi kebijakan dan menciptakan kesadaran tentang PPK. Konsultasi OMM nasional ini merupakan bagian dari kegiatan Jejaring N-Peace untuk menggalakkan kemitraan antar-OMM perempuan di Indonesia, dan juga antara pelaku masyarakat madani dan Pemerintah Indonesia seputar rancangan RAN PPK.

4

Memetakan persoalan konflik dan prioritas perempuan dalam latar pascakonflik di Indonesia

Sesi ini dilaksanakan melalui diskusi kelompok dengan membagi peserta ke dalam tiga kelompok menurut pembagian wilayah:

- Wilayah bagian timur yang terdiri dari Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat
- Wilayah bagian tengah yang terdiri dari Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur
- Wilayah bagian barat yang terdiri dari Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Jakarta.

Kelompok-kelompok tersebut membahas lima persoalan berikut:

- a. Apa saja yang sering menjadi pemicu kunci konflik berdasarkan pengalaman Anda?
- b. Apa saja praktik pencegahan/ penyelesaian yang digunakan oleh perempuan dan organisasi di dalam kelompok Anda?
- c. Apa saja kebutuhan/ prioritas kunci perempuan di dalam kelompok ini?

- d. Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam bekerja mengatasi persoalan-persoalan pembangunan perdamaian?
- e. Menurut Anda, bagaimana caranya Anda bisa saling belajar dan membantu sebagai perempuan dari provinsi yang berbeda yang menghadapi masalah yang serupa?

Pokok-pokok diskusi:

a. Pemicu kunci konflik

Ekonomi

- *Akses yang tidak setara ke kekayaan yang tercipta lantaran salah urus atau eksploitasi sumber daya alam (seperti pertambangan dan penebangan) di mana kendali sering kali berada di tangan investor dan/ atau militer dan hanya sedikit berfaedah bagi penduduk setempat.*
- *Kemiskinan yang merajalela dan gap ekonomi yang lebar antara penduduk asli dan sering kali pendatang.*



Sosial

- Kurangnya pengakuan pemerintah terhadap jati diri lokal. Hal ini sering kali mengejutkan dalam persaingan antara pemerintah dan lembaga adat terkait klaim wewenang atas urusan sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan masyarakat.
- Penstereotipan/ pelabelan berdasarkan perbedaan suku, etnis, dan agama.
- Konflik di dalam masyarakat yang sering kali dipicu oleh proses pemukiman ulang pengungsi yang mungkin diselenggarakan dengan cara yang kurang peka menurut sebagian dari masyarakat.

Politik

- Sistem politik yang terdesentralisasi telah menciptakan persoalan yang mempertajam konflik di dalam masyarakat, seperti yang ditimbulkan oleh PILKADA. Persoalan diutamakan Putra Daerah untuk jabatan publik menyoroti persaingan antara penduduk asli dan penduduk pendatang dalam hal sumber daya dan kekuasaan.
- Sengketa perbatasan daerah, teritorial, dan sumber daya antarkabupaten.
- Hubungan yang kurang selaras antara pemerintah lokal dan pusat, terutama di Papua, yang berujung dengan membelahnya masyarakat.
- Dominasi suku/ kelompok tertentu dalam pembuatan kebijakan, terutama di Maluku, yang menciptakan ketegangan di antara kelompok minoritas.

b. Praktik pencegahan/ resolusi yang telah digunakan

- Program edukasi telah digunakan untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang persoalan PPK.

Di beberapa provinsi di wilayah bagian timur Indonesia, organisasi perempuan telah menyelenggarakan pelatihan bagi kader yang berasal dari anggota masyarakat, dan mahasiswa dan staf. Sementara di wilayah bagian barat, kegiatan peningkatan kesadaran dilakukan di majlis ta'lim, dan kelompok perempuan (PKK, arisan).

- Menggalakkan pemahaman di antara berbagai kelompok masyarakat.

Organisasi perempuan di wilayah bagian tengah telah menggalakkan gerakan bukan-kekerasan berbasis masyarakat (misal, We-can dan aktif non-violence) serta kunjungan silang antarpenduduk dari berbagai kelompok etnis dan keagamaan untuk membangun afinitas dan kerja sama. Sementara di wilayah bagian timur, organisasi perempuan telah menggalakkan dialog antara berbagai kelompok etnis dan keagamaan, dan antara kelompok yang berkonflik, dan juga dengan menyebarkan pesan perdamaian lewat seni dan festival budaya.

- Organisasi perempuan di wilayah bagian timur juga telah menyelenggarakan program penguatan ekonomi rumah tangga melalui pembukaan akses perempuan ke layanan kredit mikro.



c. Kebutuhan dan prioritas kunci perempuan

- Organisasi perempuan di semua daerah merasakan bahwa peningkatan kapasitas dan keterampilan antarperempuan adalah krusial, selain meningkatkan dan mendampingi ekonomi rumah tangga. Perempuan di wilayah bagian timur merasakan terutama bahwa akses mereka ke informasi harus diperbaiki.
- Harus ada tindakan afirmatif untuk meningkatkan dan memperbaiki partisipasi perempuan dalam politik, pendidikan dan ekonomi, dengan advokasi yang lebih kuat untuk melaksanakan kebijakan dan prakarsa penganggaran yang tanggap gender.

d. Tantangan dalam bekerja pada persoalan pembangunan perdamaian

- Kurangnya komitmen pemerintah lokal dan pendampingan masyarakat untuk pelibatan perempuan dalam persoalan perdamaian dan keamanan.
- Sawar budaya seperti persepsi masyarakat terhadap perempuan sebagai 'lemah' dan memiliki peranan yang lebih terbatas dan tradisional (misal sebagai ibu).
- Perempuan masih saja mengalami keterbatasan akses ke informasi dan ke medium dan platform publik tempat mereka bisa menyuarakan prioritas dan aspirasi mereka.

- Perempuan masih saja memiliki kesempatan pengembangan kapasitas yang lebih sedikit, terutama di tingkat akar rumput.
- Kemitraan/ jejaring antarperempuan dan antarorganisasi yang menangani persoalan PPK.

e. Langkah-langkah pembelajaran bersama dan peningkatan sinergi

- Kesempatan berjejaring tempat perempuan bisa berbagi pengalaman, saling mendukung, dan saling menguatkan perlu dikembangkan. Di sini, satu hal yang sangat penting adalah membangun kepercayaan antar kelompok demi tercapainya kerja sama yang efektif.
- Membentuk dan melatih kader yang bisa bekerja menggalakkan peranan perempuan dalam PPK di berbagai provinsi dan daerah lintas negara.
- Menetapkan dan menguatkan mekanisme pembangunan perdamaian yang sudah ada di tingkat masyarakat, yang menekankan pendekatan 'people-to-people'.
- Mengembangkan kesamaan berpijak yang berlandaskan pada persoalan perikemanusiaan alih-alih persoalan teologis antarpenduduk yang berlatar belakang berbeda.



5

Pengalaman Filipina dalam Mengembangkan dan Melaksanakan Rencana Aksi Nasional 1325 – Beberapa Catatan Pengalaman. Presentasi oleh *Karen TANADA*, Director, Gaston Z. Ortigas Peace Institute, Filipina.

RAN 1325 Filipina adalah yang pertama di Asia, dan yang ke-18 di dunia. Ia merupakan proses pengembangan yang luar biasa cepat, yang sebagian besar adalah berkat upaya lobi gerakan masyarakat madani. Proses konsultasi mencakup enam konsultasi tingkat lokal, satu konsultasi nasional dengan perwakilan yang baik dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal (penduduk asli perempuan, perempuan Moro/Muslim, petani perempuan, nelayan, perempuan miskin dari wilayah perkotaan, dan perempuan maupun laki-laki dari kepolisian dan militer dan pejabat lokal). Dalam proses perancangan tidak ditemui banyak ketaksepakatan, yang terutama adalah karena rancangannya adalah sederhana dan memuat unsur-unsur yang berlandaskan pada RDK PBB 1325, yang bertujuan menyikapi perlindungan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata di Filipina.

Proses pengembangan RAN di Filipina

RAN disetujui dan ditandatangani pada Maret 2010 oleh mantan presiden Gloria Arroyo. Dia membentuk dewan pengarah untuk melaksanakan RAN, tapi dua bulan kemudian dengan pemilu dan presiden baru, sejumlah perubahan diadakan terkait dengan modalitas pelaksanaan dan penagawasan. Seorang penasihat proses perdamaian lewat Office of the Presidential Advisor on the Peace Process (OPAPP) ditunjuk untuk memimpin RAN. Dia memimpin proses untuk menelaah dan merevisi RAN untuk membuatnya lebih realistis dan praktis.

Unsur dasar yang membernaskan RAN 1325 Filipina

- *Memahami konteks konflik bersenjata.* Filipina telah mengalami konflik bersenjata selama hampir empat dasawarsa, yang melibatkan perjuangan bangsa Moro untuk hak menentukan nasib sendiri, dan perjuangan komunis. Oleh karena itu ada pengakuan perlunya perlindungan dan intervensi yang lebih baik untuk mengakhiri konflik. Jadi, pencegahan konflik dan perlindungan merupakan dua komponen RDK PBB 1325 yang diterjemahkan ke RAN Filipina.



N-PEACE Network

Engage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment

- **Analisis gender konflik.** Sejumlah tim melakukan analisis gender konflik untuk memahami secara lebih baik sebab utama konflik, dampak konflik bersenjata terhadap perempuan sebagai korban – dari segi ekonomi, politik, psikologi, dan juga dampaknya terhadap perempuan dalam peranan lainnya seperti pendukung konflik (secara sukarela maupun tidak) atau kombatan. Peranan laki-laki dan dampak konflik bersenjata terhadap mereka juga dikaji. Dua persoalan yang terutama disorot terkait dampak terhadap perempuan:

- *Perempuan menjadi korban kekerasan seksual oleh pasukan bersenjata. Data kekerasan seksual oleh pasukan bersenjata di negara ini masih terbatas. OMM telah berupaya memantau laporan dari kelompok HAM terkait persoalan ini, tapi masih ada perlawanan dan pelaporan masih sangat rendah*
- *Perempuan dari kelompok minoritas/suku asli yang bermukim di wilayah yang terpencil seperti hutan dan pegunungan, yang menjadi lokasi pertempuran, sering kali terjebak di dalam konflik dan direkrut oleh militer dan pemberontak.*

Dengan memahami dampak konflik terhadap perempuan, tindakan yang lebih konkret dan intervensi yang lebih tertargetkan bisa direncanakan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan. Tindakan tertentu juga harus



digagas secara matang untuk mencegah konflik dan mengakhiri konflik bersenjata.

- **Mengembangkan pekerjaan pembuat perdamaian perempuan.** Mengakui pekerjaan perempuan di tingkat akar rumput dalam hal pembangunan perdamaian dan pemulihan, dan menetapkan kesenjangan guna menentukan bagaimana upaya-upaya bisa dikuatkan dan didukung lebih lanjut adalah amat penting. Dalam hal Filipina ditetapkan sejumlah persoalan, misalnya:

- *Banyak perempuan yang bergiat dalam pekerjaan pembangunan perdamaian, tapi kebanyakan tidak visibel.*
- *Di antara kelompok keagamaan tertentu tempat perempuan secara tradisi tidak diperkenankan, belakangan ini terjadi perubahan dan perempuan memainkan peranan yang lebih aktif sebagai pembangun perdamaian dan mediator.*
- *Perempuan sudah menjadi bagian dari panel perdamaian pemerintah dan bernegosiasi dengan komunis, dan juga dari negosiasi perdamaian dengan Moro.*

Satu hal penting adalah untuk mengakui upaya-upaya yang sedang berjalan dan memakai mereka sebagai landasan untuk menguatkan partisipasi perempuan dan pengarusutamaan gender secara umum dalam proses perdamaian dan pemulihan.

- **Menetapkan peranan pemerintah dan nonpemerintah.** Karena RAN adalah suatu rencana nasional, tanggung jawab utama harus diemban oleh pemerintah. Pada saat yang sama, masyarakat madani mempunyai peranan yang amat penting dan karena mereka bersifat otonom peranan ideal mereka adalah sebagai pelengkap upaya-upaya pemerintah. Pengembangan dan pelaksanaan RAN menjadi paling baik apabila terdapat kerja sama pemerintah dan masyarakat madani.

Ikhtisar ringkas RAN Filipina

RAN mempunyai empat sasaran:

1. **Perlindungan dan pencegahan:** Untuk memastikan perlindungan HAM perempuan dan pencegahan pelanggaran hak tersebut dalam situasi konflik bersenjata dan pascakonflik.

Tindakan:

- Mengembangkan, memberlakukan, dan melaksanakan kebijakan yang memastikan perlindungan dan keamanan, terutama terhadap penduduk asli dan perempuan Moro yang terkena dampak konflik bersenjata;
- Mendukung program dan kapasitas satuan kerja pemerintah lokal, lembaga, dan OMM dalam memberi layanan hukum, ekonomi, edukasi, dan psikososial kepada perempuan dan anak perempuan yang merupakan pesintas konflik bersenjata dan kekerasan;
- Memperkuat sistem peradilan pidana sesuai dengan pakta dan hukum HAM internasional dan memungkinkan peraturan perundang-undangan menyikapi kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam konteks konflik bersenjata;
- Menggalakkan RDKPBB 1325 dan 1820, ketanggapan gender, CEDAW, dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang terkait dengan perempuan, perdamaian, dan keamanan antara pelaku negara dan bukan negara, terutama, namun tidak terbatas pada:
 - pihak-pihak lembaga garis depan yang terlibat dalam konflik bersenjata;
 - pelaku dalam pembangunan perdamaian, resolusi konflik, dan rekonstruksi pascakonflik;
 - lembaga pemerintah yang terlibat dalam perlindungan dan pemenuhan HAM perempuan; dan

- kelompok masyarakat madani terutama yang bergiat dalam penggalakkan hak perempuan, perdamaian, dan hukum kemanusiaan internasional.

- Meneruskan negosiasi perdamaian, bekerja menuju kesepakatan perdamaian yang lebih tanggap gender, dan menguatkan pelaksanaan mekanisme kesepakatan perdamaian, terutama gencatan senjata dan hal ihwal terkait perlindungan HAM perempuan.



N-PEACE Network

Engage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment

2. **Pemberdayaan dan partisipasi:** Untuk memberdayakan perempuan dan memastikan peran mereka secara aktif dan bermakna di bidang pembangunan perdamaian, penjagaan perdamaian, pencegahan konflik, resolusi konflik, dan rekonstruksi pascakonflik.

Tindakan:

- Mengembangkan kebijakan bukan-diskriminatif yang menyikapi situasi perempuan di sektor keamanan;
- Melibatkan anggota masyarakat perempuan sebagai pemangku kepentingan dalam program-program yang menjawab dan mengatasi dampak konflik bersenjata, memastikan partisipasi, pengaruh dan faedah untuk perempuan, terutama di antara penduduk asli dan Moro;
- Meningkatkan jumlah penganjur hak perempuan di panel perdamaian dan mekanisme perdamaian lainnya di tingkat lokal dan nasional.

3. **Penggalakan dan pengarusutamaan:** Untuk menggalakkan dan mengarusutamakan suatu perspektif gender dalam semua aspek pencegahan konflik, resolusi konflik, dan pembangunan perdamaian.

Tindakan:

- Menyatu-padukan suatu perspektif gender ke dalam rencana aksi HAM nasional, rencana pembangunan Filipina 2010-16, dan kebijakan dan program lainnya ihwal perdamaian dan HAM;
- Mengarusutamakan unsur-unsur RAN ke dalam rencana pembangunan nasional, daerah, dan lokal terutama di dalam proses perencanaan GAD mereka dan mengalokasikan dana dari anggaran GAD serta menapis sumber daya lainnya untuk pelaksanaannya;

- Menyatu-padukan perdamaian, HAM, non-kekerasan, dan edukasi gender di semua tingkat pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- Menggalakkan pelibatan OMM, terutama aktivis perdamaian dan kelompok perempuan dalam pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian RAN;
- Mengejar kampanye advokasi yang tanggap gender dan tanggap budaya melalui media arus utama, alternatif, dan komunitas untuk menjadikan masyarakat sadar tentang persoalan perempuan dalam perdamaian dan konflik termasuk peranan vital perempuan dalam pekerjaan perdamaian dan keamanan.

4. **Pengembangan kapasitas dan pemantauan dan pelaporan:** Untuk melembagakan suatu sistem yang memantau, menilai, dan melaporkan pelaksanaan RAN guna meningkatkan akuntabilitas demi pelaksanaan yang sukses dan pencapaian sasaran-sasarannya.

Tindakan:

- Membentuk sistem pemantauan, penilaian, dan pelaporan RAN



Beberapa pelajaran dari pengalaman Filipina:

- **Komitmen pemerintah.** Pemerintah mengemban peranan dan tanggung jawab utama terkait NAP. Ia harus merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu sesuatu yang ingin dan bisa dilakukan oleh pemerintah, alih-alih hanya berupa sepotong kertas. Di Filipina, ketika RAN awal mula dirancang, pelibatan masyarakat madani adalah sangat kuat dan mendominasi proses. Akibatnya, tidak ada cukup kepercayaan dari pemerintah dalam menyepakati semua unsur di dalam rencana. Akan tetapi, dengan kepemimpinan Penasihat Presiden dalam merancang RAN, sekarang pemerintah mengujungtombaki pelaksanaan RAN.
- **Justifikasi hukum yang kuat.** Pada 2009, setahun sebelum RAN ditandatangani, Filipina mengundang Magna Carta perempuan sebagai 'perjanjian HAM', yang merupakan suatu undang-undang bercakupan luas mengenai pelaksanaan CEDAW. Di dalamnya terdapat bab yang relevan dengan RDK PBB 1325 yang juga dimuat di dalam Magna Carta. Oleh karena itu, RAN memiliki dasar yang sangat kuat, bukan saja sebagai perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden, tapi juga dijadikan sebagai bagian dari hukum.
- **Kepemimpinan pemerintah dan kemauan politik.** Kepemimpinan pemerintah adalah sangat penting. Filipina mempunyai dukungan penuh dari Presiden untuk negosiasi perdamaian dan pelaksanaan kesepakatan dengan oposisi, termasuk dengan kelompok Moro.
- **Pemerintahan yang berkomitmen dan kompeten bertanggung jawab melaksanakan RAN.** Struktur dewan pengarah (SC) mencakup suatu badan tingkat tinggi. Ketua SC adalah penasihat presiden untuk proses perdamaian, di mana anggotanya merupakan pejabat

tingkat tinggi termasuk perwakilan Menteri dari Departemen Kehakiman, Departemen Pertahanan Nasional, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Lokal, Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan, dan Ketua Komisi Nasional Muslim Filipina dan Ketua Komisi Nasional Penduduk Asli.

- **Pemantauan oleh OMM.** Advokasi OMM adalah sangat penting dalam melengkapi upaya pemerintah dan dalam memastikan akuntabilitas tindakan untuk melaksanakan RAN. Gerakan masyarakat madani di Filipina telah membentuk suatu kelompok yang bertindak sebagai dewan bayangan atau rekan imbalan SC pemerintah. Kelompok ini bernama WE Act 1325 (Women Engaging in Action on 1325). Para anggotanya berasal dari OMM dari seluruh penjuru negara.

Tantangan dalam pelaksanaan:

- Di sisi pemerintah, OPAPP sering kali sangat sibuk dengan aspek lainnya yang terutama berhubungan dengan negosiasi perdamaian, pelaksanaan kesepakatan perdamaian, dan rencana pembangunan perdamaian. Jadi, strategi utamanya adalah mendorong peningkatan peranan dan partisipasi perempuan dalam program-program perdamaian melalui pengarusutamaan dan penyatu-paduan tindakan-tindakan RAN.
- Secara khas terdapat kekurangan sumber daya untuk melaksanakan tindakan-tindakan. Satu strategi adalah mengakses anggaran GDP (gender dan pembangunan). Menurut peraturan perundang-undangan Filipina, semua lembaga dan pemerintah lokal harus mengalokasikan 5% dari anggaran mereka kepada program dan prakarsa gender dan pembangunan. Sebagian dari RAN mengindikasikan untuk mengakses anggaran GDP untuk mendanai tindakan-tindakan yang mendukung pelaksanaan RAN 1325.

N-PEACE Network

Engage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment

Diskusi:

- Menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan berbasis gender (KSBG) oleh militer di zona konflik merupakan persoalan yang sulit untuk diatasi. Contoh-contoh disebutkan dari Filipina di mana korban sering kali menolak meneruskan kasus atau perempuan kalah di pengadilan karena prasangka yang ada. Oleh karena itu perlu ada sistem pendukung di tingkat lokal, dengan pendampingan kesehatan dan legal yang tepat, yang mensyaratkan kemitraan antara berbagai lembaga, OMM, dan academia.
- Dalam hal aspek pelaksanaan RAN di Filipina, masih terlalu dini untuk berkomentar karena belum ada pengkajian. Semuanya masih berada dalam tahap awal pelaksanaan karena RAN ditandatangani pada 2010 dan baru-baru ini direvisi. Akan tetapi, RAN tersebut berguna dalam memberi suatu kerangka dan panduan untuk semua upaya yang akan dikoordinasikan, dan dalam memastikan pemantauan yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih besar.



6

Presentasi RAN mengenai Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan dan agenda pelaksanaan MENEG P3A. Presentasi oleh Bapak *Jonhar JOHAN*, Asisten Deputi Perlindungan Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Latar belakang perumusan RAN di Indonesia

- Tugas dan fungsi Kementerian adalah membantu Presiden merumuskan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada khususnya, salah satu kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak adalah beleid “zero tolerance” terhadap kekerasan.
- Suatu penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Partisipasi Perempuan pada 2008 di Ambon, Atambua, dan Poso menunjukkan bahwa perempuan menderita banyak beban akibat dampak konflik bersenjata, termasuk kehilangan suami dan menjadi kepala rumah tangga, dan menderita akibat KSBG. Penelitian tersebut merekomendasi agar pemerintah mengambil langkah-langkah secara segera dan berkelanjutan guna melindungi perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender, selama dan setelah suatu krisis.
- Konsep utama resolusi 1325 yang menegaskan pentingnya kesetaraan partisipasi dan pelibatan perempuan dalam penjagaan perdamaian dan keamanan. Resolusi tersebut menyerukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pencegahan dan penyelesaian konflik dan menegaskan bahwa pelibatan perempuan dalam proses perdamaian bisa memberi kontribusi yang nyata ke perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan.



Dalam hal ini, pemerintah memandang penting untuk melaksanakan upaya sebagai berikut:

- Perumusan suatu kebijakan nasional untuk program-program yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan;
- Peningkatan peranan perempuan dalam pemulihan dan pembangunan; dan
- Penyatu-paduan sistematis suatu perspektif gender ke dalam sektor keamanan dan peradilan.

Proses pengembangan RAN di Indonesia

- Tujuh konsultasi telah diselenggarakan dalam rangka mengembangkan dan menelaah RAN, yang pertama mengambil tempat pada Februari 2009, dan yang terkini merupakan rapatkoordinasipemerintahpada2011.MENEG P3A juga akan menyelenggarakan konsultasi yang akan mengikat dan mengoordinasi delapan kementerian tambahan. Kementerian Luar Negeri telah mendesak MENEG P3A untuk segera menyelesaikan RAN agar bisa disetujui pada Hari Perdamaian Sedunia pada September 2011. Selain itu, RAN diharapkan rampung sebelum akhir 2011, karena pada tahun ini Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN sehingga bisa memamerkan upaya-upayanya dalam melaksanakan RDK PBB 1325 kepada negara anggota ASEAN lainnya.
- Rancangan RAN dan rancangan Keputusan Presiden telah siap dan setelah konsultasi Nasional OMM ini akan dirumuskan indikator-indikator RAN. Meskipun RAN harus dirampungkan secara mendesak, satu hal yang penting untuk diakui adalah bahwa proses tersebut adalah sangat penting untuk memastikan dialog yang inklusif. Kebanyakan konsultasi berlangsung sangat positif, tanpa perlawanan yang berarti, baik dari masyarakat madani maupun dari lembaga pemerintah atau kementerian.
- MENEG P3A mengadakan rapat koordinasi pada April 2011, yang merupakan rapat konsultasi ketujuh tentang RAN 1325. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari tujuh kementerian, dan MENEG P3A mempresentasikan faedah RAN terhadap kementerian-kementerian terkait hal-hal sebagai berikut:
 - *Persoalan gender dan pemberdayaan perempuan akan disatu-padukan ke dalam sektor keamanan, hukum dan peradilan, politik, dan lainnya.*
- *Masing-masing kementerian bakal harus menerapkan penganggaran tanggap gender (PPRG: Penganggaran yang Responsif Gender) yang mengharuskan setiap kebijakan atau program yang akan didanai mempertunjukkan bahwa ia akan memberi faedah yang setara kepada laki-laki maupun perempuan. PPRG diharapkan diterapkan oleh semua pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten per 2014. OMM dan aktivis perempuan diharapkan bisa berperan aktif dalam memantau pelaksanaan kebijakan ini.*
- *Pengakuan hak perempuan sebagai HAM dan sebagai suatu hal pokok dalam pekerjaan pembangunan pemerintah secara menyeluruh.*
- *Pelaksanaan RDK PBB 1325 akan secara positif berdampak pada persoalan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam latar konflik bersenjata.*

Pelaksanaan RAN

- Dokumen akan diberi nama RAN Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. 70-80% unsur RDK PBB 1325 telah disatu-padukan ke dalam RAN.
- Alokasi anggaran berasal dari APBN, APBD, dan sumber tidak mengikat lainnya.
- RAN akan disahkan lewat Kepres. Kepres akan menentukan pekerjaan, tugas, dan fungsi masing-masing kementerian terkait dengan persoalan perdamaian dan keamanan, dan modalitas pelaksanaan di tingkat provinsi dan lokal.
- Diperkirakan bahwa sektor utama kebijakan dan program ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (MENKOKESRA), sebab MENEG P3A berada di bawah MENKOKESRA. Sementara itu, MENEG P3A akan bertanggung jawab memantau dan menilai aspek-aspek RAN.

Pokok-pokok diskusi:

- OMM bisa berperan aktif dalam memantau RAN di tingkat lokal.
- Satu hal yang penting adalah memastikan bahwa RAN bersifat praktis dan memiliki tindakan-tindakan yang realistis dan terikat waktu yang bisa dilaksanakan dan dipenuhi.
- Selain RAN yang berfokus menyikapi situasi konflik bersenjata ada RUU Konflik Sosial yang saat ini tengah digodok. Satu hal penting adalah untuk memastikan adanya hubungan yang kuat antara RAN dan RUU Konflik Sosial.



7

Umpan balik mengenai RAN PPK dari perspektif perempuan dalam latar pascakonflik:

Kepada peserta dibagikan salinan rancangan RAN sebelum mereka dibagi ke dalam kelompok wilayah yang sama dan diminta untuk mencerminkan prioritas-prioritas terkait dengan hubungan mereka dengan keempat pilar RAN, berdasarkan perspektif dan kebutuhan yang mereka tetapkan di sesi terdahulu. Keempat pilar RAN, dengan menggunakan RDK PBB 1325 sebagai dasar, adalah:

- **Pencegahan:** Pencegahan pengulangan konflik dan segala bentuk kekerasan struktural dan fisik terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk KSBG.
- **Perlindungan:** Keselamatan, kesehatan fisik dan mental, dan jaminan ekonomi perempuan dijamin dan HAM mereka dihargai.

- **Partisipasi:** Penyertaan perempuan dan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik.
- **Pertolongan dan Pemulihan:** Kebutuhan khusus perempuan dipenuhi dalam situasi konflik dan pascakonflik.



PILAR 1

PENCEGAHAN: PENCEGAHAN PENGULANGAN KONFLIK DAN SEGALA BENTUK KEKERASAN STRUKTURAL DAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN, TERMASUK KSBG.

Persoalan prioritas

- Meningkatkan akses ke informasi mengenai langkah-langkah preventif
- Mendeteksi potensi konflik pada tahap awal, mengurangi konflik atas sumber daya alam
- Meningkatkan kesadaran tentang pluralisme
- Melibatkan media daerah/ lokal dalam kampanye perdamaian
- Memastikan keadilan di dalam peradilan, dan sistem hukum
- Meningkatkan peranan perempuan dalam proses pembangunan perdamaian
- Mengadvokasi pengalokasian anggaran kepada program dan prakarsa perempuan, perdamaian, dan keamanan

N-PEACE Network

Engage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment

Tantangan dalam pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sarana pendidikan formal dan informal • Sawar geografis • Ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada • Budaya patriarkat dan feodalisme, penafsiran keagamaan, dan hukum/ norma dan nilai adat yang mendiskriminasi perempuan • Media kurang peka dalam memberitakan kasus kekerasan berbasis gender • OMM memiliki sedikit hubungan dengan jejaring media sehingga susah untuk mengadvokasi pesan-pesan yang benar mengenai persoalan PPK ke masyarakat umum • Belum ada sistem peringatan dini konflik yang dikembangkan secara baik di tingkat masyarakat • Keterampilan analisis konflik yang kurang yang berujung dengan intervensi yang tidak menyikapi sebab utama konflik • Inkonsistensi antara kebijakan nasional dan lokal mengenai norma agama dan adat/ sosial • Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, kepolisian, dan kejaksaan tentang bagaimana menangani persoalan gender secara peka di sistem hukum dan peraturan perundang-undangan • Korupsi yang merajalela dan politik kepentingan mengesampingkan kebutuhan dan prioritas perempuan dalam proses penganggaran
Peranan OMM dan kelompok perempuan dalam pelaksanaan RAN	<p>Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat ekonomi di tingkat rumah tangga/ masyarakat melalui pendampingan kredit mikro dan layanan pendampingan ekonomi lainnya <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edukasi tentang antikorupsi, edukasi yang menyatu-padukan nilai-nilai keadilan gender, edukasi pembangunan perdamaian untuk perempuan, penelitian penafsiran keagamaan yang menyatu-padukan perspektif gender dan nilai-nilai keadilan gender • Edukasi pembangunan perdamaian untuk perempuan • Penelitian penafsiran keagamaan yang menyatu-padukan perspektif gender • Mendirikan pusat informasi yang mudah diakses • Membentuk kelompok diskusi untuk interaksi yang lebih banyak antara perempuan dan OMM • Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan <p>Advokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Advokasi penganggaran yang responsif gender untuk pengalokasian sumber daya yang akan membantu menjadikan pelaksanaan RAN suatu kenyataan • Kampanye perdamaian dan berjejaring dengan media • Advokasi untuk meningkatkan sarana dan akses transportasi • Pelatihan legal untuk pusat paralegal dan pemeriksaan putusan pengadilan • Melaksanakan instrumen berbasis masyarakat untuk memantau potensi konflik seperti, misalnya, menggunakan peace assessment card, dan kemudian mengadvokasi hasil ke pemangku kepentingan
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah harus memastikan peningkatan akses masyarakat ke informasi • Pemerintah lokal harus menetapkan kebijakan sumber daya alam yang jujur dan adil, dan memastikan bina lingkungan untuk mencegah timbul dan berkembangnya konflik • Memastikan teknik dan langkah penyelesaian konflik menggunakan pendekatan hukum, sosial, budaya, dan ekonomi alih-alih militer
PILAR 2	
PERLINDUNGAN: KESELAMATAN, KESEHATAN FISIK DAN MENTAL, DAN JAMINAN EKONOMI PEREMPUAN DIJAMIN DAN HAM MEREKA DIHARGAI.	
Persoalan prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi konflik/ friksi antara penduduk asli dan pendatang • Melindungi perempuan dari KSBG dan mendukung penyelesaian kasus KSBG agar mereka memperoleh keadilan • Menghapus pengasingan perempuan yang menjadi korban KSBG • Mengembangkan jaminan sosial untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan masyarakat • Mengalokasikan anggaran kepada program dan kegiatan PPK • Mengarusutamakan perspektif gender ke dalam rencana dan langkah-langkah perdamaian, keamanan, dan pembangunan • Meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan perdamaian
Tantangan dalam pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Stigma yang meluas yang melekat pada korban KSBG • Label budaya dan gagasan patriarkat bahwa perempuan adalah lebih lemah • Kurangnya naungan bagi korban KSBG • Munculnya kebijakan nasional dan lokal yang mendiskriminasi perempuan dan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan • Tidak adanya jaminan keamanan bagi aktivis perdamaian • Kurangnya pemahaman mengenai keadilan gender dan HAM • Tidak adanya pengalokasian anggaran kepada perlindungan perempuan, lemahnya akuntabilitas dan transparansi anggaran. Anggaran terutama dialokasikan kepada kepentingan infrastruktur dan pemerintahan
Peranan OMM dan kelompok perempuan dalam pelaksanaan RAN	<ul style="list-style-type: none"> • Menggalakkan dialog dengan tokoh agama dan adat untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang peranan gender dan keadilan gender • Menggalakkan dialog antarkelompok dari keyakinan yang berbeda • Memfasilitasi penyatu-paduan instrumen lokal dan asli, dan nilai dan norma lokal dalam menyelesaikan konflik • Mengembangkan komunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan perempuan • Advokasi perlindungan hukum bagi aktivis HAM, terutama bagi mereka yang berada dalam latar konflik • Advokasi pengalokasian anggaran kepada program perlindungan dan keamanan perempuan
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menggalakkan dialog budaya antara berbagai pemangku kepentingan • Menghidupkan kembali hukum adat yang menyatu-padukan kesetaraan gender sebagai bagian dari agenda penyelesaian konflik

PILAR 3	
PARTISIPASI: PENYERTAAN PEREMPUAN DAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PENYELESAIAN KONFLIK.	
Persoalan prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan perwakilan perempuan dari wilayah konflik dalam proses pembangunan perdamaian Menguatkan mekanisme partisipasi perempuan dalam membernaskan kebijakan
Tantangan dalam pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya beban dan peranan yang ditanggung dan diemban oleh perempuan Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak perempuan Perempuan memiliki kesempatan yang lebih sedikit dan tingkat pendidikan yang lebih rendah Proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki (tokoh agama, tokoh adat, dan kementerian dan lembaga pemerintah). Bahkan jika ada perempuan yang dilibatkan di dalam proses, partisipasi mereka jarang bermakna dalam mempengaruhi atau menentukan hasil Media formal partisipatori untuk perencanaan pembangunan (musrenbang) baru formalitas dan belum bisa menyatu-padukan aspirasi dari akar rumput
Peranan OMM dan kelompok perempuan dalam pelaksanaan RAN	<p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Meneliti dan menghidupkan kembali kearifan dan nilai-nilai lokal yang tanggap gender dan mendukung pemberdayaan perempuan Mensosialisasikan kesetaraan gender di dalam rumah tangga dan masyarakat Meningkatkan kapasitas perempuan melalui edukasi dan dialog Edukasi dan pelatihan politik dan kepemimpinan bagi perempuan lokal <p>Advokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan partisipasi perempuan melalui penggunaan instrumen dan mekanisme berbasis masyarakat Menyatupadukan perspektif gender ke dalam langkah dan prakarsa penanganan konflik berbasis masyarakat Mengadvokasi penggunaan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) dan musrenbangna (musyawarah rencana pembangunan nasional)
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah harus memastikan bahwa suatu perspektif gender yang kuat disatu-padukan ke dalam program dan alokasi anggaran pembangunan Kebijakan kuota 30% anggota DPR perempuan harus dilaksanakan bukan saja di dalam politik tapi juga di dalam sektor lainnya Memantau dan menilai pelaksanaan UU No. 7/1989 tentang CEDAW secara efektif
PILAR 4	
PERTOLONGAN DAN PEMULIHAN: KEBUTUHAN KHUSUS PEREMPUAN DIPENUHI DALAM SITUASI KONFLIK DAN PASCAGONFLIK.	
Persoalan prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan kebutuhan tertentu perempuan selama dan di dalam proses pemulihan dan rehabilitasi Menyatupadukan pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan rehabilitasi dan pemulihan Meningkatkan perikatan dan penyatu-paduan masyarakat dalam latar pascakonflik dan selama intervensi pemulihan perencanaan Memastikan komitmen pemerintah untuk memenuhi hak korban konflik berbasis agama
Tantangan dalam pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Trauma akibat situasi konflik dan prasangka yang ada antaranggota masyarakat. Penyembuhan trauma bukan menjadi prioritas pemerintah sehingga pendampingan pemerintah dalam program penyembuhan perempuan dan masyarakat masih kurang. Pendampingan terutama ditujukan kepada bantuan kemanusiaan tapi bukan untuk rehabilitasi korban konflik (misal akibat konflik bersenjata di Aceh dan Poso dan konflik keagamaan yang terkait dengan Ahmadiyah) Program pemulihan tidak mengakomodasi kebutuhan tertentu perempuan dalam latar pascakonflik. Hanya sedikit upaya yang dilakukan untuk menjawab dan mengatasi kebutuhan mendesak mereka terkait dengan kesehatan reproduksi atau penyembuhan trauma Program pemulihan tidak menggalakkan kemandirian masyarakat atau keberlanjutan Selalu ada penundaan terhadap persoalan penting, seperti pembahasan rancangan hukum KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) di tingkat nasional yang masih tertunda, serta penundaan pembahasan Qanun KKR, terutama di Aceh
Peranan OMM dan kelompok perempuan dalam pelaksanaan RAN	<ul style="list-style-type: none"> Penyembuhan trauma melalui pendirian kelompok-kelompok pendukung untuk berbagi pengalaman, membentuk WCC (women crisis center), melaksanakan kegiatan sosial melalui saluran populer menggunakan seni dan olahraga Menetapkan kelompok-kelompok rentan dan kebutuhan tertentu mereka Membentuk perserikatan mediasi dan pendampingan untuk konflik yang berbasis agama Advokasi rancangan hukum KKR, advokasi Qanun KKR di tingkat lokal
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> Menggalakkan kegiatan pemulihan dan pertolongan untuk penyembuhan trauma melalui pendekatan psikososial dan mendirikan pusat trauma terutama di wilayah konflik atau pascakonflik Intervensi tertargetkan untuk meningkatkan ekonomi di tingkat rumah tangga

8

Menciptakan advokasi mengenai persoalan perempuan, perdamaian, dan keamanan: Membangun Strategi Edukasi, Sosialisasi, dan Kampanye untuk Jejaring N-Peace: Presentasi oleh *Brian HANLEY* dan *Agus Hadi NAHROWI*, Search for Common Ground

Tentang Search for Common Ground (SFCG)

- SFCG telah 30 tahun bekerja di bidang pembangunan perdamaian dan kini bergiat di 26 negara di seluruh dunia. Di Asia, ia bergiat di lima negara, dan memiliki program di keempat negara Jejaring N-Peace: Timor-Leste, Nepal, Sri Lanka, dan Indonesia. Misi SFCG adalah mentransformasikan cara dunia menangani konflik, dengan mentransformasikan konflik menjadi sesuatu yang konstruktif bagi masyarakat.
- SFCG mulai bergiat di Indonesia per 2002, yaitu pada masa transisi kala ada keprihatinan yang nyata soal eskalasi konflik. Pada saat yang sama pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dan masyarakat madani dan media masih dalam masa pertumbuhan
- Banyak pekerjaan SFCG berfokus pada kegiatan dengan masyarakat madani dan media dalam rangka membawa transformasi konflik masyarakat. Lebih spesifik, mereka melaksanakan pekerjaan mereka dengan menggunakan pertunjukan drama radio, festival perdamaian dan budaya, festival film, pelatihan transformasi konflik, dan mendukung pemberdayaan perempuan dan kegiatan mediasi.



Catatan pengalaman SFCG:

- Media dan saluran yang dipakai untuk advokasi bergantung pada sejumlah faktor, dan satu hal yang menjadi sangat penting adalah untuk berpikir secara kreatif tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyebar pesan yang benar mengenai perdamaian dan kesetaraan gender.
- Satu hal penting adalah untuk menjaga momentum, terutama kala bergiat lewat suatu jejaring. Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam merancang strategi untuk Jejaring N-Peace dan dalam melihat bagaimana kita bisa menjaga momentum, terutama dalam menangani persoalan-persoalan yang berhubungan dengan RAN 1325.

N-PEACE Network

Engage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment

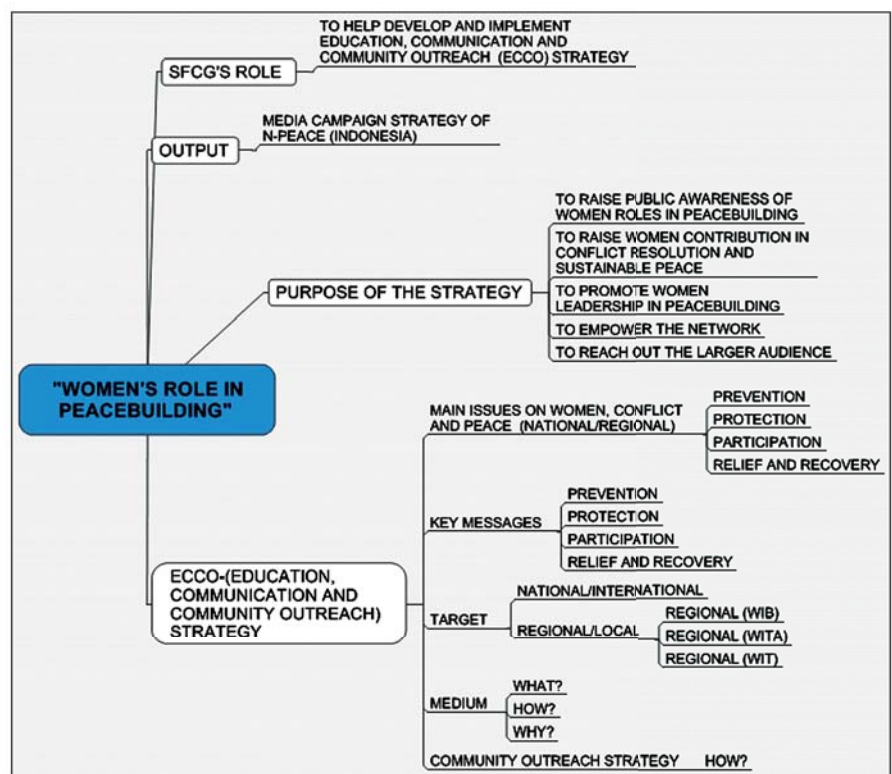
- Sembari mengembangkan bahan advokasi dan sosialisasi, keluaran akhir adalah penting tapi proses pengembangannya adalah sama pentingnya untuk mempertemukan masyarakat dan memperoleh suatu visi dan pesan-pesan kolektif.
- Selain memakai berbagai bentuk media, peranan sosialisasi masyarakat adalah krusial. Advokasi atau pemberitaan (messaging) apa pun tidak akan berhasil tanpa adanya sosialisasi masyarakat yang kuat guna mengubah perilaku dan sikap. Jadi, strategi media apa pun harus ditautkan kepada upaya-upaya sosialisasi masyarakat yang kuat.



9

Mengembangkan strategi advokasi dan sosialisasi untuk Jejaring N-Peace di Indonesia

Peserta diminta membahas suatu strategi untuk mengembangkan pesan-pesan advokasi mengenai persoalan dan prioritas sebagaimana dibahas di sesi terdahulu. Gambar di bawah ini menggariskan proses perancangan strategi tersebut.



PILAR 1. PENCEGAHAN: PENCEGAHAN PENGULANGAN KONFLIK DAN SEGALA BENTUK KEKERASAN STRUKTURAL DAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN, TERMASUK KSBG.

WILAYAH	PERSOALAN POKOK	ISI PESAN	CAPAIAN TERMAKSUD (PERUBAHAN DALAM PENGETAHUAN, PERILAKU, KESADARAN, DSB.)	KELOMPOK SASARAN (PEMANGKU KEPENTINGAN)	MEDIA
Timur	Melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan		Kesadaran masyarakat tentang potensi kapasitas perempuan dalam proses pembangunan perdamaian	<ul style="list-style-type: none"> — Rumah tangga — Rukun tetangga — Lembaga adat — Lembaga keagamaan — Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> — Kelompok diskusi/ forum dialog masyarakat — Kampanye pada hari perempuan — Program radio
Tengah	Meningkatkan sinergi dalam gerakan perdamaian perempuan yang melibatkan berbagai organisasi: kelompok keagamaan, lembaga adat, dan unsur masyarakat lainnya	Sinergi antara kelompok, organisasi, orang seorang akan meningkatkan efektivitas upaya pembangunan perdamaian	Pergeseran paradigma dalam cara berpikir dan bertindak orang, untuk mampu bekerja sama dan bersinergi	<ul style="list-style-type: none"> — Pemimpin perempuan — Pengambil keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> — Edukasi, pelatihan
Barat	Mencegah kekerasan berbasis gender	Katakan TIDAK kepada kekerasan	Pengetahuan, kesadaran, dan perilaku	<ul style="list-style-type: none"> — Masyarakat akar rumput — Pemimpin masyarakat — Pemerintah — Pendidik 	<ul style="list-style-type: none"> — Pertemuan/ forum masyarakat — <i>Roadshow</i> — Edukasi — Film documenter

PILAR 2. PERLINDUNGAN: KESELAMATAN, KESEHATAN FISIK DAN MENTAL, DAN JAMINAN EKONOMI PEREMPUAN DIJAMIN DAN HAM MEREKA DIHARGAI.

WILAYAH	PERSOALAN POKOK	ISI PESAN	CAPAIAN TERMAKSUD (PERUBAHAN DALAM PENGETAHUAN, PERILAKU, KESADARAN, DSB.)	KELOMPOK SASARAN (PEMANGKU KEPENTINGAN)	MEDIA
Timur dan Barat	Hak asasi perempuan dilalaikan		Hak perempuan terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> — Lembaga adat — Lembaga keagamaan — Pesintas kekerasan — Pelaku kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> — Advokasi regulasi yang memastikan pemenuhan hak perempuan — Sosialisasi yang kontinu dan tertargetkan baik bagi pesintas maupun pelaku kekerasan
			Pengetahuan, kesadaran, dan perilaku	<ul style="list-style-type: none"> — Pendidik — Murid 	<ul style="list-style-type: none"> — Komik — Musik — Teater
Tengah	Tidak adanya naungan bagi korban kekerasan	Naungan bisa memberi perempuan korban kekerasan perlindungan dan bantuan	<ul style="list-style-type: none"> — Pendampingan pemerintah dalam mendirikan naungan — Alokasi anggaran lokal kepada naungan 	<ul style="list-style-type: none"> — Pemerintah lokal — OMM — Lembaga keagamaan dan adat — Anggota DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> — Lobi — Konsultasi — Dialog

PILAR 3. PARTISIPASI: PENYERTAAN PEREMPUAN DAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PENYELESAIAN KONFLIK.

WILAYAH	PERSOALAN POKOK	ISI PESAN	CAPAIAN TERMAKSUD (PERUBAHAN DALAM PENGETAHUAN, PERILAKU, KESADARAN, DSB.)	KELOMPOK SASARAN (PEMANGKU KEPENTINGAN)	MEDIA
Timur dan Barat	Kurangnya pelibatan dan kepemimpinan perempuan dalam proses pembangunan perdamaian	Mengakui perempuan sebagai pelaku perdamaian	Pengetahuan, kesadaran, dan perilaku	<ul style="list-style-type: none"> — OMM — Pemerintah — Lembaga adat dan keagamaan — Pemimpin perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> — Film dokumenter — Pertunjukan seni budaya — Program radio — Esai foto
	OMM prihatin dan berkomitmen terhadap pemberdayaan perempuan lokal tapi menghadapi kendala kapasitas untuk menyelenggarakan program-program yang relevan			<ul style="list-style-type: none"> — Pemimpin perempuan — OMM yang bergiat untuk pemberdayaan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> — Kelompok diskusi — Edukasi/ pelatihan
Tengah	<ul style="list-style-type: none"> — Kurangnya pengakuan peranan perempuan — Kurangnya akses perempuan ke proses perdamaian 	Pengakuan peranan perempuan dan meningkatkan akses perempuan ke proses perdamaian akan berkontribusi ke pembangunan perdamaian secara nyata	Peningkatan kesadaran tentang kesetaraan gender dalam proses perdamaian	<ul style="list-style-type: none"> — Anggota DPR — Pemimpin agama dan masyarakat — Kelompok perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> — Dialog — Lembar fakta

PILAR 4: PERTOLONGAN DAN PEMULIHAN: KEBUTUHAN KHUSUS PEREMPUAN DIPENUHI DALAM SITUASI KONFLIK DAN PASCAKONFLIK.

WILAYAH	PERSOALAN POKOK	ISI PESAN	CAPAIAN TERMAKSUD (PERUBAHAN DALAM PENGETAHUAN, PERILAKU, KESADARAN, DSB.)	KELOMPOK SASARAN (PEMANGKU KEPENTINGAN)	MEDIA
Timur	Kurangnya pelibatan perempuan dalam upaya resolusi konflik dan proses perdamaian	Perempuan bisa memainkan peranan yang efektif dalam pemulihan konflik dan pertolongan	Pergeseran paradigma menuju persoalan konflik, perdamaian, dan gender	Lembaga edukasi formal dan informal	<ul style="list-style-type: none"> — Kurikulum — Modul khusus — Pertunjukan seni budaya
Tengah	Program pemulihan belum menyikapi kebutuhan tertentu perempuan, dan telah menciptakan ketergantungan	Pemenuhan kebutuhan tertentu perempuan dalam situasi konflik merupakan prioritas untuk perdamaian secara menyeluruh dan pembangunan	Pengambil keputusan menjadi lebih tanggap terhadap kebutuhan gender dan menganggap mereka sebagai agenda prioritas	<ul style="list-style-type: none"> — Anggota DPR — Eksekutif 	<ul style="list-style-type: none"> — Pendampingan teknis
Barat	Kebutuhan tertentu perempuan dan anak dalam latar pascakonflik belum dijawab dan diatasi	Mendengarkan suara perempuan yang telah menjadi korban ketidakadilan	Pengetahuan, kesadaran, dan perilaku	<ul style="list-style-type: none"> — Pemerintah — Korban perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> — Dokumentasi her-story — Film dokumenter — Penyembuhan trauma dengan menggunakan forum masyarakat yang memfasilitasi kelompok-kelompok perempuan korban

10 Langkah Selanjutnya

SFCG telah 30 tahun bekerja di bidang pembangunan perdamaian dan kini bergiat di 26 negara di seluruh dunia. Di Asia, ia bergiat di lima negara, dan memiliki program di keempat negara Jejaring N-Peace: Timor-Leste, Nepal, Sri Lanka, dan Indonesia. Misi SFCG adalah mentransformasikan cara dunia menangani konflik, dengan mentransformasikan konflik menjadi sesuatu yang konstruktif bagi masyarakat.

Diskusi mengenai pemetaan persoalan konflik dan prioritas perempuan dalam latar pascakonflik mempertunjukkan bahwa sebab utama dan dampak konflik di Indonesia mempunyai berbagai dimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Di antara persoalan lainnya yang telah disajikan sebelumnya, satu hal yang bisa disorot adalah dampak sistem desentralisasi di Indonesia terhadap perempuan. Desentralisasi telah membuka ruang untuk pelibatan dan partisipasi lokal dalam proses pembuatan kebijakan tapi, pada saat yang sama, ia membawa sejumlah kerentanan tertentu kepada masyarakat, dan terutama kepada perempuan. Meski perencanaan pembangunan telah menerapkan pendekatan bawah-atas (seperti musrenbang), kapasitas perempuan yang kurang terkadang menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh di dalam proses. Budaya patriarkat masih hidup dan menjadi sawar terhadap partisipasi perempuan secara penuh dan bermakna. Hasilnya, kebutuhan dan prioritas perempuan sering dilangkahi dalam agenda pembangunan lokal. Ini merupakan aspek yang harus disikapi lebih lanjut dalam rangka menguatkan peranan perempuan dalam proses pembangunan perdamaian dan pemulihan.

Terlepas dari kendala kesempatan, akses, keamanan dan kapasitas, perempuan di akar rumput terus bergiat secara substansial

dalam proses pembangunan perdamaian dan pemulihan. Banyak OMM bergiat di tingkat akar rumput untuk menciptakan kesadaran dan menggunakan media masyarakat/ lokal untuk sosialisasi masyarakat. Namun, sejumlah OMM yang hadir di konsultasi juga mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak koordinasi dan pendampingan kapasitas untuk upaya-upaya mereka.

Perspektif yang dibagi selama lokakarya telah ditangkap di dalam laporan ini untuk digunakan oleh MENEG P3A di tahap berikut perampungan RAN PPK. Hal ini akan memastikan bahwa RAN mencerminkan realitas perempuan di tingkat akar rumput lintas provinsi dari berbagai daerah di negara ini. Ia juga akan mendampingi proses dalam memastikan bahwa perempuan yang akan merasakan dampak terbesar RAN memiliki suara dan pengaruh dalam membernaskan isi dan substansinya.

Akhirnya, masukan yang diterima di sesi lainnya di konsultasi, terutama yang berhubungan dengan pemberitaan dan advokasi, akan digunakan oleh UNDP dan SFCG untuk membernaskan lebih lanjut suatu strategi media dan sosialisasi untuk Jejaring N-Peace di Indonesia.

Di penutupan lokakarya dibahas sejumlah cara untuk melanjutkan kerja sama dan bagaimana agar tetap menjadi terikat. Beberapa di antaranya bisa dilihat di platform sambung-jaring Jejaring N-Peace (www.n-peace.net) yang akan terus menjadi titik temu bagi anggota jejaring dan memberi pemutakhiran mengenai RAN PPK dan kegiatan regional lainnya yang telah direncanakan.

LAMPIRAN

DAFTAR PESERTA

Manado, 8-9 June 2011

No.	Province/ Country		Given Name	Last Name	Institution	Email Address
1	Aceh	Ms.	Shadia	Marhaban	Liga Inong Aceh (LINA)	shadmar12@yahoo.com
2	Aceh	Ms.	Leila	Juari	Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK)	tim_rpk@yahoo.co.id
3	DKI Jakarta	Ms.	Ulfa	Hidayati	Kapal Perempuan	ulfa.hidayati@kapalperempuan.org
4	DKI Jakarta	Ms.	Risma	Umar	Solidaritas Perempuan	risma.umar@gmail.com
5	West Kalimantan	Ms.	Martalena		Center for Reasearch and Inter-Religious Dialogue (CRID)	martalenaayong@yahoo.com
6	West Nusa Tenggara	Mr.	Deni	Wanputra	LEGITIMID	legitimid_sumbawabarat@yahoo.com
7	West Nusa Tenggara	Ms.	Erma	Suriani	LBH NTB	bundabuna2009@yahoo.co.id
8	East Nusa Tenggara	Ms.	Nurkasih		Rumah Perempuan	rmhpereempuan@yahoo.co.id
9	East Nusa Tenggara	Ms.	Stephana W.B. Sanith	Kono	Peace Centre	welly.kono@gmail.com
10	North Sulawesi	Ms.	Sitti Nurlaili	Djanaan	Suara Parangpuang	lidjena@yahoo.com
11	North Sulawesi	Ms.	Kemerlien	Ondang	UKIT	Kemer.ondang@gmail.com
12	North Sulawesi	Ms.	Ona	Djangoan	Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)	onadjangoan@yahoo.co.id
13	Central Sulawesi	Ms.	Nurhajjah	Tahumil	Peace Center	nurtahumil@yahoo.co.id
14	North Maluku	Ms.	Electronita	Duan	SANRO	sanro_tobelo@yahoo.com
15	North Maluku	Ms.	Juliche D	Baura	Peace Center	finbaura@gmail.com
16	Maluku	Ms.	Oliva	Lasol	Lembaga Antar Iman (Interfaith) Maluku	oliva_lasola@yahoo.com
17	Maluku	Zr.	Brigitta	Renyaan	Yayasan Kasih Mandiri Ambon	brigitarenyaan@yahoo.com
18	West Papua	Mr.	Jeffrey	Simanjuntak	INSOS Sumander	juntax_79@yahoo.com
19	West Papua	Ms.	Acemo Arijantje	Rumere	Yayasan Triton Papua	geonuelmatmey@yahoo.co.id
20	Papua	Mr.	Yulianus Joli	Hisage	Baliem Peace Village	alexanderlogo@yahoo.com
21	DKI Jakarta	Mr.	Willem	Rampangilei	Kemekokesra	ssyahabuddin@yahoo.com
22	DKI Jakarta	Mr.	Andi M.	Natsir	Kemenkokesra	ssyahabuddin@yahoo.com
23	DKI Jakarta	Mr.	Syahabuddin		Kemenkokesra	ssyahabuddin@yahoo.com
24	DKI Jakarta	Mr.	Jonhar	Johan	MOWE	jonhar_johan@hotmail.com
25	DKI Jakarta	Mr.	Pieter	Manoppo	ITP	piety562002@yacoo.com
26	DKI Jakarta	Mr.	Brian D.	Hanley	SFCG	bhanley@sfcg.org
27	DKI Jakarta	Mr.	Agus	Nahrowi	SFCG	ahnahrowi@sfcg.org
28	DKI Jakarta	Ms.	Leli	Nurohmah	SFCG	lnurohmah@sfcg.org
29	Yogyakarta	Ms.	Emil	Karmila	Consultant for Proceeding report	emilkarmila@yahoo.com
30	DKI Jakarta	Mr.	Arif	Suryo	Interpreter	suryoarif@yahoo.com
31	North Sulawesi	Ms.	Cesyli	Saroinson	Journalist, Manado Post	Cesyli_saroinson@yahoo.co.id
32	Philippines	Ms	Karen	Tanada		ktanada@gmail.com
33	Thailand	Ms.	Radhika	Behuria	UNDP	radhika.behuria@undp.org
34	DKI Jakarta	Mr.	Stephen	Rodrigues	UNDP	stephen.rodrigues@undp.org
35	DKI Jakarta	Ms.	Maja	Suhud	UNDP	maja.suhud@undp.org
36	DKI Jakarta	Mr.	Thamrin	Hanafi	UNDP	thamrin.hanafi@undp.org
37	DKI Jakarta	Mr.	Wiryan	Nimpuno	UNDP	wiryan.nimpuno@undp.org
38	DKI Jakarta	Ms.	Budi	Ayu	UNDP	budi.ayu@undp.org

Kerangka Acuan Kerja Lokakarya

Terms of Reference

National Civil Society Consultation: Perspectives of Women in making peace in Indonesia

Background

October 2010 marked the ten-year anniversary of the UN Security Council Resolution 1325 on women, peace and security. To perform a deliberate exercise in reflecting on successes and existing challenges, the Regional Crisis Prevention and Recovery team brought together over thirty representatives from civil society, government and UNDP offices from Indonesia, Nepal, Sri Lanka and Timor Leste, with the aim to establish a multi-country network called N-PEACE (Engage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment). The N-PEACE network supports strengthening of the role of women in leading community social cohesion, and peace building. The members of the network identified a number of challenges and collectively discussed strategies that can be employed to bridge these gaps. In particular, the need for providing organizations and women leaders with a space to network and voice their demands, needs and contributions, was highlighted as a critical area of need.

The Ministry of Women's Empowerment in Indonesia is currently drafting the National Action Plan on UNSCR 1325/Policy related to Women, Peace and Security. To this end, a national CSO consultation is being organized by the Crisis Prevention and Recovery Unit of UNDP CO Indonesia and the Indonesia N-PEACE network members, and in collaboration with the Asia Pacific Regional Centre in Bangkok. The national consultation will provide opportunities for civil society organizations and women activists from post-conflict and potential conflict areas in the country to discuss and deliberate such a policy, identify and/map women's issues and concerns that relates to the policy of UNSCR 1325 and/or record and provide inputs to such an important process. The consultation will be co-hosted by UNDP CO Indonesia and the Coordinating Ministry for People's Welfare; with major focus largely in post-conflict and potential conflict areas, namely: Aceh, West Kalimantan, Central Sulawesi, Maluku, North Maluku, East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, Papua and West Papua. DKI Jakarta being a conflict prone province and North Sulawesi as the host area of the conference will also be invited.

The consultative conference will also be participated in by N-PEACE Network members from Indonesia, namely Liga Inong Aceh, Institut Titian Perdamaian, Interfaith Maluku, Humanitarian Development Centre, Komite Nasional Perempuan and the State Ministry of Women's Empowerment and Child Protection.

While all N-PEACE network members will be part of the organizing committee for the CSO consultation, it is critical to select one organization which can serve as the coordinator/focal point for the arrangement of the consultation. In order to provide capacity support to the organizations and ensure sustained support and engagement, members of the N-Peace Network members will be invited to participate in the bidding process to conduct this national consultative conference.

Objective and Outputs

Objectives: The National Civil Society Consultation on the perspectives of women in maintaining peace in Indonesia intends to achieve the following objectives:

(i) To present the Draft National Action Plan(NAP) on women, peace and security to CSOs from 10 provinces; (ii) To deliberate on the perspectives and experiences of women from the ten provinces and their feedback on the NAP; (iii) To provide CSOs with the opportunity and space to network, discuss and share experiences and common challenges; (iv) To map the priorities and perspectives of women from the ten provinces.

Outputs: The achievement of the above-mentioned objectives are linked to the following outputs: (i) A perspectives/discussion paper from the CSOs to be used as an input in workshops and dialogues being organized by the Government of Indonesia to discuss the Policy on Women, Peace and Security; (ii) An expansion of the multi-country N-PEACE network to include more CSOs from Indonesia; (iii) Mapping of women's priorities from these high-risk/post-conflict areas to form the basis for an advocacy/socialization campaign.

Process: The conference will include the following processes to achievement the expected outputs: • Keynote speeches from the GoI and UNDP • Presentations from resource persons • Group work • Panel presentation of results of group work • Concluding remarks

Schedule/ Agenda: The CSO Consultation will be held on:

Day/ Date: Wed/ Thu, 8-9 June 2011 Location: Manado, North Sulawesi

Participant: 23 CSO representatives from 10 selected provinces, National Governments, UN Agencies

Agenda Lokakarya

Day1		8 th June 2011		
Time	Session	Structure	Presenters/ Facilitators	
0900 – 1000	Opening Session <ul style="list-style-type: none">- Welcome remarks- Key Note Speech- Stating goals, objectives and outputs for the workshop- Introductions		UNDP Indonesia Ministry for Peoples Welfare Facilitators	
1000 - 1030	Session 1: <ul style="list-style-type: none">- Introduction to the N-PEACE network: what it is, what activities are being organized (2011-12 workplan) and ideas about a local Indonesia N-PEACE chapter		UNDP/N-PEACE members	
1030 – 1100	Break			
1100 – 1200	Session 2: Group work and experience sharing Women discuss their priorities and challenges in their provinces, and strategies used to prevent violence and build peace		Facilitators	
1200-1230	Presentations and discussions (from session 2)		Participants	
1230 – 1330	Lunch			
1330 – 1430	Session 3: Sharing experiences <ul style="list-style-type: none">- Philippines Perspective: lessons learned <i>Discussion and Q & A</i>		Ms. Karen Tanada, Philippines	
14:30-15:30	Session 4: Presentation of the NAP/Policy on women, peace and security and MOWE's agenda for implementation <ul style="list-style-type: none">- Presentation Question and Answers		MOWE	
1530 – 1600	Break			
1600 – 1730	Session 5: Group work to discuss NAP from the perspective of women in post-conflict and high-risk to conflict areas		Facilitators	
Day 2		9 th June 2011		
Time	Session	Structure	Presenters/ Facilitators	
0900 – 1100	Session 6: Feedback on the NAP Presentations and consolidation of inputs for NAP		Participants	
1100 – 1130	Break			
1130 – 1230	Session 7: Discussion to identify key messages from CSOs from across the country on socialization/advocacy related to women's roles in peace building, conflict transformation and recovery		SFCG	
1230 – 1330	Lunch			
1330 – 1530	<i>Session continues. . . .</i>			
1530 – 1600	Break			
1600 – 1700	<i>Session continues. . . .</i>			
1700-1715	Closing and next steps			

N-PEACE

To join N-PEACE :
Send an email to: N-PEACE@groups.undp.org

Initiated by

United Nations Development Programme. Asia-Pacific Regional Centre and
Country Offices in Indonesia, Nepal, Sri Lanka and Timor-Leste.



in partnership with

The Institute for
Inclusive Security



supported by

